

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bersamaan tekad pemerintah pusat untuk meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri dan dipertegas dengan lahirnya undang-undang otonomi daerah yang terdiri dari Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) dan Undang-Undang RI No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah telah mendapatkan suatu mandat dalam mempercepat proses pembangunan dengan suatu model percepatan pembangunan yaitu Daerah otonom disertai kemandirian pengelolaan daerah.

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Beberapa daerah mengalami pertumbuhan cepat sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Kesenjangan antar daerah sering sekali mejadi permasalahan yang serius, disini peran pemerintah daerah

sangat menentukan. Pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi pada daerahnya agar mampu menghadapi permasalahan dalam penyelenggaraan daerah otonom dapat mengambil kebijakan atau mengusulkan strategi bagi pembangunan daerahnya, memperbaiki lingkungan daerah agar mampu mendukung perkembangan perekonomian.

Dalam proses pembangunan dilingkungan negara spasial tidak selalu merata kesenjangan antar daerah seringkali menjadi permasalahan. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan sama sekali dimana tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula mampu menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta tingkat pengangguran, hal ini disebabkan oleh karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, adanya kecenderungan peranan modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga tenaga kerja yang terampil, disamping itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat pada daerah ( Tim P4N-UGM dan BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah,1997:1-2 ).

Setiap kabupaten di propinsi Jawa Timur memberikan sumbangsih dalam pembangunan yang tidak sedikit. Kabupaten Jombang mempunyai peranan dalam meningkatkan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi di kabupaten Jombang sebagai indikator salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang di ukur

dengan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) selama kurun waktu delapan tahun ( 1995 – 2002 ) mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 1995 mencapai lebih dari 6% dan pada tahun 1996 terjadi penurunan menjadi 5%. Pada tahun 1997 terjadi penurunan menjadi 3% serta pada tahun 1998 terjadi penurunan menjadi minus 12,8% walaupun perekonomian di kabupaten Jombang Jawa Timur pada tahun tahun 1999 sudah mengalami kenaikan sebesar 0,864 pada tahun 2000 sudah tumbuh positif sebesar 3,06% pada tahun 2001 terjadi kenaikan sebesar 3,60% pada tahun 2002 terjadi penurunan sebesar 3,59% atas dasar harga konstan 1993 hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 1.1  
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jombang  
Atas dasar harga konstan 1993  
Tahun 1995 – 2002

Tahun	PDRB ( 000,Rp )	Pertumbuhan %
1995	1.093.148.798	6,18
1996	1.157.486.482	5,88
1997	1.195.021.538	3,24
1998	1.041.152.390	-12,8
1999	1.050.150.171	0,864
2000	1.082.340.447	3,06
2001	1.121.411.673	3,60
2002	1.161.675.397	3,59

Sumber : PBS, PDRB Kabupaten Jombang, 1995 – 2002

Pertumbuhan negatif yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang terjadi di kabupaten Jombang merupakan dampak dari krisis ekonomi yang melanda. Dampak krisis tersebut sangat berpengaruh besar terhadap kabupaten Jombang.

Kabupaten Jombang memiliki 21 kecamatan dimana kecamatan tersebut memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Laju pertumbuhan PDRB di kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten Jombang mengalami fluktuasi. Tingkat pertumbuhan paling tinggi pada tahun 1996-2002 adalah kecamatan Perak yang lebih dari 135% pada tahun 2002 sedangkan kecamatan Megaluh mengalami penurunan minus 24,69% pada tahun 2002 hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.2  
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jombang Jawa Timur  
Atas Harga Konstan 1993 menurut Kecamatan  
Tahun 1996-2002

No	Kecamatan	1996 %	1997 %	1998 %	1999 %	2000 %	2001 %	2002 %
1	Bandar kd mulyo	14,86	10,47	5,84	19,55	20,75	3,52	5,49
2	Perak	16,73	30,37	5,13	25,05	29,42	135,59	9,97
3	Gudo	4,43	14,28	-36,55	-56,91	-7,27	-19,26	6,74
4	Diwek	5,45	2,29	-12,21	-1,06	2,60	16,61	3,62
5	Ngoro	16,82	16,45	5,93	2,80	1,87	-2,00	2,63
6	Mojowarno	14,06	6,69	-49,42	-10,18	0,46	5,20	4,07
7	Bareng	9,11	29,06	24,76	-2,48	2,07	28,96	0,57
8	Wonosalam	8,40	7,12	-11,19	1,14	0,87	5,52	0,62
9	Mojoagung	5,40	5,02	-17,27	2,58	-2,95	6,54	1,75
10	Somobito	4,12	3,40	-1,72	-3,56	2,48	24,64	-1,92
11	Jogoroto	14,77	9,57	5,88	19,25	20,26	13,75	10,05
12	Peterongan	5,45	2,23	-13,33	-1,23	2,47	4,99	1,80
13	Jombang	0,50	-8,79	0,33	3,89	3,82	13,37	1,04
14	Megaluh	17,58	-0,41	-35,96	0,25	2,53	77,31	-24,69
15	Tembelang	5,48	4,74	27,47	3,35	5,63	30,95	2,59
16	Kesamben	13,90	39,92	-6,08	-9,68	1,24	14,97	-2,69
17	Kugu	2,30	31,52	-20,25	0,21	0,14	10,81	4,06
18	Ngusikan	10,16	24,00	-13,04	-1,45	11,37	21,40	6,71
19	Ploso	6,57	5,99	-30,53	-3,49	-4,32	2,32	1,11
20	Kabuh	2,13	3,56	-9,63	8,23	3,14	-12,02	-2,08
21	Plandaan	10,30	9,77	-22,47	-1,08	4,14	0,22	8,32

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Jombang, 1996-2002

Dalam tabel 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB di kabupaten Jombang mengalami perbedaan yang cukup mencolok.

Adapun alasan penulis memilih kabupaten Jombang karena pertimbangan kabupaten ini terletak di propinsi Jawa Timur yang merupakan propinsi maju, sebagai pusat industri ke dua setelah Jakarta. Dalam hal perekonomian kabupaten Jombang termasuk dalam daerah relatif tertinggal (low growth and low income) bersama dengan 22 kabupaten lainnya (Okta. 2004: 61). Dengan kata lain daerah ini mempunyai pendapatan perkapita maupun pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata daerah di propinsi Jawa Timur dikarenakan kurang mendapat perhatian baik di tingkat propinsi maupun daerah. Keistimewaan dari kabupaten ini berbatasan langsung dengan dua daerah yang termasuk dalam daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high income) di bagian utara adalah Mojokerto, di bagian selatan Kediri. Berbatasan langsung dengan daerah maju tapi tertekan (high income but low growth) di bagian selatan daerah Malang, di mana ketiga daerah ini merupakan pusat industri, pabrik, perdagangan maupun pariwisata yang menjadi penyumbang terbesar produk domestik regional bruto (PDRB) ( Okta, 2004: 62 ). Sedangkan kabupaten Jombang merupakan daerah yang mempunyai potensi besar akan tetapi belum di olah secara baik, perbedaan tingkat pembangunan antar kecamatan di kabupaten Jombang yang memiliki 21 kecamatan serta sumber daya alam dan manusia masih belum optimal dan merata pembangunannya. Adanya dugaan bahwa Produk Domistik Regional Bruto ( PDRB ) dan pelaksanaan pembangunana yang tidak merata pada tiap-tiap kecamatan sehingga akan menimbulkan ketimpangan atau ketidakmerataan pertumbuhan. Dengan latar belakang uraian diatas, maka penyusun akan

mengangkat judul : “ **Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Jombang Jawa Timur, 1995-2002** “.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana klasifikasi struktur perekonomian kecamatan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita di kabupaten Jombang Jawa Timur.
2. Seberapa besar tingkat ketimpangan antar kecamatan di kabupaten Jombang Jawa Timur.
3. Apakah dapat dibuktikan berlaku atau tidak hipotesis Kuznets tentang “U” terbalik di kabupaten Jombang Jawa Timur.

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan yang terjadi antar kecamatan di kabupaten Jombang Jawa Timur. Untuk melakukan pengidentifikasian tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan digunakan variabel PDRB per kapita kecamatan, PDRB per kapita kabupaten Jombang, jumlah penduduk kecamatan, jumlah penduduk kabupaten, dalam kurun waktu 8 tahun yaitu pada tahun 1995-2002.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengklasifikasikan kecamatan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita.
2. Untuk menghitung ketimpangan-ketimpangan antar kecamatan di kabupaten Jombang Jawa Timur.
3. Untuk membuktikan hipotesis kuznets tentang U-terbalik di kabupaten Jombang Jawa Timur

#### **1.5 Manfaat penelitian :**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh :

1. Pemerintah daerah kabupaten  
Sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam pengalokasian dana pembangunan kepada pemerintah tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan sesuai dengan kondisi alamnya serta sumber daya manusia yang dapat dikembangkan.
2. Masyarakat  
Sebagai salah satu masukan dan untuk menambah pengetahuan tentang pertumbuhan perekonomian di tingkat kabupaten .
3. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana pada fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II GAMBARAN UMUM**

Bab ini merupakan uraian / diskripsi / gambaran secara umum atas obyek penelitian.

### **BAB III KAJIAN PUSTAKA**

Berisi hasil penelitian sebelumnya yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

### **BAB IV LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini memuat teori-teori yang relevan untuk dijadikan acuan dalam penulisan.

### **BAB V METODE PENELITIAN**

Akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini.



**BAB VI ANALISIS DATA**

Berisi analisis data yang diperoleh dalam penelitian.

**BAB VII KESIMPULAN DAN APLIKASI**

Berisikan tentang kesimpulan dan hasil-hasil perhitungan analisis dan aplikasi yang sesuai dengan permasalahan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Keadaan Geografis di Kabupaten Jombang Jawa Timur**

Secara umum, luas wilayah kabupaten Jombang mencapai 1,159.50 Km<sup>2</sup> habis terbagi menjadi 21 kecamatan meliputi : Bandar kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Ngoro, Mojowarno, Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang, Kesamben, Kudu, Ngusikan, Ploso, Kabuh, Plandaan.

Daerah dikabupaten Jombang memiliki wilayah dengan ketinggian > 700 m yaitu kecamatan wonosalam sebagai daerah tertinggi sedangkan daerah yang memiliki letak ketinggian terendah yaitu kecamatan ploso < 500 m tepatnya 25,96 m dan kecamatan lainnya terletak pada ketinggian < 500 m untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Letak Ketinggian, Luas Daerah**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Jombang**

No	Kecamatan	Letak Ketinggian ( M )			L uas Dearah ( Km2 )
		< 500	500 - 700	> 700	
1	Bandar Kedung Mulyo	32,50	-	-	32,50
2	Perak	29,05	-	-	29,05
3	Gudo	34,39	-	-	34,39
4	Diwek	47,70	-	-	47,70
5	Ngoro	49,86	-	-	49,86
6	Mojowarno	78,62	-	-	78,62
7	Bareng	94,27	-	-	94,67
8	Wonosalam	63,65	50,756	7,22	121,63
9	Mojoagung	60,18	-	-	60,18
10	Sumobito	47,64	-	-	47,64
11	Jogoroto	28,28	-	-	28,28
12	Peterongan	29,47	-	-	29,47
13	Jombang	36,40	-	-	36,4
14	Megaluh	28,41	-	-	28,41
15	Tembelang	32,94	-	-	32,94
16	Kesamben	51,72	-	-	51,72
17	Kudu	77,75	-	-	77,75
18	Ngusikan	34,98	-	-	34,98
19	Ploso	25,96	-	-	25,96
20	Kabuh	97,35	-	-	97,35
21	Plandaan	120,40	-	-	120,4
	Kabupaten Jombang	1.101,52	50,756	7,22	1.159,50

Sumber : BAPPEDA, BPS Kabupaten Jombang

## 2.2. Keadaan Perekonomian di Kabupaten Jombang Jawa Timur.

Kabupaten Jombang memiliki peran dalam pertumbuhan perekonomian Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi di kabupaten Jombang sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang di ukur dengan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) selama kurun waktu delapan tahun ( 1995-2002 ) mengalami fluktuasi. Pada tahun 1995 pertumbuhan ekonomi di kabupaten Jombang mencapai lebih dari 6% dan mengalami penurunan sebesar 3% pada tahun 1997.

Krisis ekonomi yang mengguncang perekonomian Indonesia pada tahun 1998 juga di rasakan oleh kabupaten Jombang, dan berdampak pertumbuhan ekonomi mengalami kemerosotan -12% sehingga melumpuhkan perekonomian kabupaten Jombang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jombang**  
**Atas dasar Harga Konstan 1993**  
**Tahun 1995 – 2002**

Tahun	PDRB ( 000,Rp )	Pertumbuhan %
1995	1.093.148.798	6,18
1996	1.157.486.482	5,88
1997	1.195.021.538	3,24
1998	1.041.152.390	-12,8
1999	1.050.150.171	0,864
2000	1.082.340.447	3,06
2001	1.121.411.673	3,60
2002	1.161.675.397	3,59

Sumber : PBS, PDRB Kabupaten Jombang, 1995 – 2002

Perekonomian pada kecamatan di kabupaten Jombang Jawa Timur relatif bervariasi, ada kecamatan yang tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi dan tidak sedikit pula kecamatan yang tingkat perumbuhannya rendah untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.3

Tabel 2.3  
 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jombang  
 Menurut Kecamatan  
 Atas Dasar Harga Konstan 1993  
 Tahun 2002

No	Kecamatan	Tahun 2002	Pertumbuhan %
1.	Bandar Kedung Mulyo	27.015.338	5.49
2.	Perak	3.673.832	99.7
3.	Gudo	4.144.873	67.4
4.	Diwek	59.618.103	36.2
5.	Ngoro	61.594.380	26.2
6.	Mojowarno	42.228.864	40.7
7.	Bareng	39.851.712	0.57
8.	Wonosalam	138.859.215	0.62
9.	Mojoagung	152.633.559	1.75
10.	Sumobito	102.199	-1.92
11.	Jogoroto	29.193.103	10.05
12.	Peterongan	70.539.271	1.80
13.	Jombang	392.095.318	10.4
14.	Megaluh	1.486.572	-24.09
15.	Tembelang	3.921.888	2.59
16.	Kesamben	10.209.572	-2.69
17.	Kudu	10.549.411	4.06
18.	Ngusikan	14.493.569	6.71
19.	Ploso	43.904.002	1.11
20.	Kabuh	36.174.069	-2.06
21.	Plandaan	124.150.689	8.32
Kabupaten Jombang		1.240.239.539	182.66

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Jombang, 2002

Dalam tabel 2.3 dapat dilihat bahwa perekonomian kecamatan di kabupaten Jombang tahun 2000 sangat bervariasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi kurang dari 1% ada enam daerah yaitu kecamatan Bareng, Wonosalam, Sumobito, Megaluh, Kesamben, Kabuh. Untuk tingkat pertumbuhan ekonomi lebih dari 1% ada lima belas daerah yaitu kecamatan Bandar kedung mulyo, Perak, Gudo, Diwek, Ngoro, Mojowarno, Mojoagung, Jogoroto, Peterongan, Jombang, Tembelang, Kudu, Ngusikan, Ploso, Plandaan.

Untuk perkembangan PDRB perkapita kecamatan di kabupaten Jombang juga terjadi perbedaan juga antara PDRB perkapita terendah dan PDRB perkapitanya tinggi. Kabupaten Jombang pada tahun 2002 PDRB perkapitanya mencapai Rp13.109,15 untuk daerah yang memiliki PDRB terendah Kecamatan Kesamben dengan PDRB perkapita tahun 2002 sebesar Rp 478,10. Sedangkan daerah yang memiliki PDRB perkapita tinggi adalah kecamatan Jombang dengan PDRB perkapita mencapai Rp 2.575,39. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel, berikut :

Tabel 2.4  
PDRB Per Kapita Menurut Kecamatan  
Atas Dasar Harga Konstan 1993 ( 000,Rp )  
Tahun 2002

No	Kecamatan	Tahun 2002
1	Bandar Kedung Mulyo	599.13
2	Perak	755.31
3	Gudo	763.69
4	Diwek	673.28
5	Ngoro	945.22
6	Mojowarno	525.95
7	Bareng	810.14
8	Wonosalam	1.270.16
9	Mojoagung	1.630.17
10	Sumobito	677.90
11	Jogoroto	730.83
12	Peterongan	933.98
13	Jombang	2.575.39
14	Megaluh	932.57
15	Tembelang	780.79
16	Kesamben	478.10
17	Kudu	898.43
18	Ngusikan	715.31
19	Ploso	944.27
20	Kabuh	944.25
21	Plandaan	1.116.03
Kabupaten Jombang		1.015.87

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Jombang

Dari tabel 2.4 dapat dilihat bahwa daerah yang PDRB perkapitanya tinggi atau melebihi PDRB perkapita kabupaten Jombang adalah kecamatan Wonosalam, Mojoagung, Jombang, Plandaan, sedang daerah yang PDRB perkapitanya lebih rendah dari PDRB perkapita kabupaten Jombang ada 17 kecamatan diantaranya Bandar kedung mulyo, Perak, Gudo, Diwek, Ngoro, Mojowarno, Bareng, Somobito, Jogoroto, Peterongan, Tembelang, Kesamben, Kudu, Ngusikan, Ploso, Kabuh.

### **2.3 Keadaan Penduduk di Kabupaten Jombang**

Jumlah penduduk di kabupaten Jombang relatif merata penyebarannya. Sebagian ada yang berada di kabupaten ada pula yang sudah menetap di kecamatan. Jumlah penduduk pada tahun 2002 yang paling banyak adalah kecamatan Jombang dengan jumlah 119.546 jiwa dan kedua adalah kecamatan Diwek dengan jumlah penduduk sebanyak 88.940 jiwa sedangkan untuk jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Ngusikan dengan jumlah penduduk 20.306 jiwa hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5  
Jumlah Penduduk Akhir Tahun Kabupaten Jombang  
Menurut Kecamatan  
Tahun 2002

Kecamatan	Jumlah ( Jiwa )
1	2
010. BandarKedungmulyo	44.128
020. Perak	48.416
030. Gudo	52.532
040. Diwek	88.940
050. Ngoro	65.201
060. Mojowarno	80.641
070. Bareng	49.340
080. Wonosalam	30.686
090. Mojoagung	69.385
100. Sumobito	73.867
110. Jögorotö	53.686
120. Peterongan	56.417
130. Jombang	119.546
140. Megaluh	37.093
150. Tembelang	50.247
160. Kesamben	61.095
170. Kudu	29.660
171. Ngusikan	20.306
180. Ploso	40.426
190. Kabuh	38.759
200. Plandaan	36.965
<b>Kabupaten Jombang</b>	<b>1.148.336</b>

Sumber : BPS, Kabupaten Jombang  
( Registrasi Penduduk )

Pada tabel 2.5 diketahui bahwa jumlah penduduk akhir tahun paling besar adalah kecamatan Jombang. Dengan jumlah penduduk sebesar 119.546 jiwa menempatkan kecamatan Jombang mencapai peringkat pertama dalam hal jumlah penduduk pada tahun 2002. Secara keseluruhan jumlah penduduk kecamatan yang



kurang dari 30.000 jiwa ada dua kecamatan meliputi kecamatan Kudu dengan jumlah penduduk 29.660 jiwa sedangkan untuk kecamatan Ngusikan jumlah penduduk masih 20.306 jiwa sebab kecamatan Ngusikan merupakan pecahan dari kecamatan Kudu pada tahun 2001 dalam hal ini kecamatan Ngusikan baru menjadi kecamatan pada tahun 2001.

Perkembangan jumlah penduduk di kabupaten Jombang dalam beberapa tahun ini sangatlah cepat.hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Penduduk Akhir Tahun**  
**Kabupaten Jombang**  
**Tahun 1995 - 2002**

Tahun	Jumlah ( Jiwa )
1995	1.078.855
1996	1.098.422
1997	1.106.438
1998	1.114.150
1999	1.121.721
2000	1.129.027
2001	1.138.473
2002	1.148.336

sumber : **BPS, Kabupaten Jombang**  
( Registrasi Penduduk )

Dalam tabel 2.6 dapat dilihat jumlah penduduk kabupaten Jombang pada tahun 1995 sebesar 1.078.855 jiwa dan pada tahun 1996 menjadi 1.098.422 jiwa hal ini berarti bahwa dengan jangka waktu satu tahun ( 1995-1996 ) jumlah penduduk di kabupaten Jombang bertambah sebanyak 19.567 jiwa. Tahun 1998 jumlah penduduk Kabupaten Jombang 1.114.150 jiwa dan pada tahun 1999 berubah menjadi 1.121.721 jiwa. Selama kurun waktu lima tahun ( 1995-1999 )

jumlah penduduk di kabupaten bertambah sebanyak 42.866 jiwa, pada tahun 2002 jumlah penduduk menjadi 1.148.336 jiwa

#### **2.4 Keadaan Pendidikan di Kabupaten Jombang.**

Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar disegala tingkatan baik formal maupun informal. Sejak dijalankannya program wajib belajar enam tahun telah disusun suatu program pendidikan nasional dalam undang-undang No. 2 Tahun 1989. Kemudian di berlakukan wajib belajar sembilan tahun pada tahun 1994 untuk mewujudkan pendidikan dasar yang bermutu dan menjangkau penduduk didaerah terpencil. Sejalan dengan kebijakan tersebut maka peningkatan prestasi sekolah penduduk harus diimbangi dengan peningkatan sarana fisik pendidikan dan guru yang memadai.

Dari data yang diperoleh untuk tingkatan Taman Kanak-kanak di kabupaten Jombang berjumlah 15.176 murid pada tahun 2002. Untuk jumlah murid Taman Kanak-kanak Negeri berjumlah 72 murid dan Taman Kanak-kanak Swasta 25.099 murid. Taman Kanak-kanak yang paling banyak adalah kecamatan Jombang dengan jumlah 2.992 murid dengan jumlah murid pada Taman Kanak-kanak Negeri berjumlah 77 murid dan Taman Kanak-kanak Swasta berjumlah 2915 murid dan yang paling sedikit jumlah murid Taman Kanak-kanak adalah kecamatan Bandar kedung mulyo dengan jumlah 360 murid untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.7.

Pendidikan Sekolah Dasar Jombang yang paling sedikit jumlah muridnya atau jumlahnya kurang dari 3.000 murid adalah kecamatan Bandar kedung Mulyo, Jogoroto, Megaluh, Kudu, Ngusikan dan Ploso sedangkan jumlah murid yang

paling banyak adalah kecamatan Jombang dengan jumlah 10.962 dengan murid di sekolah Negeri sebanyak 10.737 murid dan swasta sebanyak 225 murid, diikuti oleh kecamatan Mojoagung dengan jumlah 5.379 murid sekolah dasar untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.7 .

Dalam tabel 2.7 dapat dilihat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di kabupaten Jombang. Pada tingkatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Untuk kabupaten Jombang yang paling banyak muridnya adalah kecamatan Jombang dengan jumlah 6.157 murid dengan murid di SLTP Negeri sebanyak 5.091 dan SLTP Swasta sebanyak 1.066, sedangkan untuk daerah yang memiliki jumlah murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang paling sedikit adalah kecamatan Ngusikan yang jumlahnya 554 murid.

Untuk Sekolah Menengah Umum (SMU) daerah perkotaan di kabupaten Jombang pada tahun 2002 yang paling banyak jumlah muridnya adalah kecamatan Jombang sebanyak 5.184 murid dan untuk kecamatan yang paling sedikit adalah kecamatan Wonosalam dan Ngusikan untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.7.

Tabel 2.7  
Jumlah Murid Sekolah Negeri dan Swasta  
Menurut Kecamatan  
Tahun 2002

Kecamatan	Pendidikan				
	TK	SD	SMP	SMU	SMK
010. Bandar Kedungnulyo	360	2.802	594	433	0
020. Perak	463	3.600	2.535	1.699	544
030. Gudo	733	4.495	1.435	86	0
040. Diwek	956	5.109	1.740	845	1.389
050. Ngoro	877	5.068	2.622	1.108	806
060. Mojowarno	732	5.109	1.988	251	61
070. Bareng	627	4.942	973	335	0
080. Wonosalam	534	3.349	795	0	0
090. Mojoagung	979	5.471	2.985	908	2.458
100. Sumobito	858	5.078	2.590	140	267
110. Jogoroto	499	2.940	1.009	432	46
120. Peterongan	693	3.493	2.678	1.876	578
130. Jombang	2.992	10.962	6.157	5.184	9.078
140. Megaluh	389	2.500	1.073	197	0
150. Tembelang	677	3.238	1.829	223	185
160. Kesamben	842	4.351	1.785	872	112
170. Kudu	386	2.071	880	521	110
171. Ngusikan	291	1.736	554	0	0
180. Ploso	390	2.999	1.925	1.385	1.875
190. Kabuh	514	3.694	1.156	490	0
200. Plandaan	384	3.025	1.023	173	0
<b>Kabupaten Jombang</b>	<b>15.176</b>	<b>86.032</b>	<b>38.326</b>	<b>17.161</b>	<b>3.208</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang

Pada tabel 2.7 jumlah murid Taman Kanak-kanak di kabupaten Jombang sebanyak 15.175 murid, jumlah murid Sekolah Dasar di kabupaten Jombang mencapai angka 86.032 murid, jumlah murid Sekolah lanjutan Tingkat Pertama mencapai angka 38.416 murid dan untuk Sekolah Menengah Umum berjumlah

17161 murid. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah murid di kabupaten Jombang pada tahun 2002 paling banyak adalah tingkat Sekolah Dasar.

Di kabupaten Jombang terdapat pula Perguruan Tinggi meskipun tidak secara keseluruhan kecamatan memiliki, kecamatan Diwek memiliki satu universitas, kecamatan peterongan Memiliki satu akademi, kecamatan Jombang memiliki dua universitas, dua sekolah tinggi dan lima akademi untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.8.

Tabel 2.8  
 Jumlah Perguruan Tinggi Swasta  
 di Kabupaten Jombang  
 Tahun 2002

Kecamatan	Jenis Perguruan Tinggi		
	Universitas	Sek.Tinggi	Akademi
1	2	3	4
010. Bandar Kedungmulyo	0	0	0
020. Perak	0	0	0
030. Gudo	0	0	0
040. Diwek	1	0	0
050. Ngoro	0	0	0
060. Mojowarno	0	0	0
070. Bareng	0	0	0
080. Wonosalam	0	0	0
090. Mojoagung	0	0	0
100. Sumobito	0	0	0
110. Jogoroto	0	0	0
120. Peterongan	0	0	1
130. Jombang	2	2	5
140. Megaluh	0	0	0
150. Tembelang	0	0	0
160. Kesamben	0	0	0
170. Kudu	0	0	0
171. Ngusikan	0	0	0
180. Ploso	0	0	0
190. Kabuh	0	0	0
200. Plandaan	0	0	0
<b>Kabupaten Jombang</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Jombang

### BAB III

#### KAJIAN PUSTAKA

Di bawah ini disajikan beberapa penelitian sebelumnya yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

#### 1. Penelitian Sjafrizal (1997)

Dari penelitian "Sjafrizal" mengenai "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat". Gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah dalam hal ini dianalisis dengan menggunakan *Klassen Typologi* sebagai dasar analisis, sedangkan untuk tendensi pemerataan pembangunan antar wilayah dianalisis dengan menggunakan *Indeks Ketimpangan Regional (Regional Inequality)* yang semula di gunakan oleh Jeffrey G Williamson.

Melalui analisis *Klassen Typologi* dapat diperoleh empat klasifikasi Propinsi yang masing-masing berbeda.

Klasifikasi Propinsi di Wilayah Indonesia Bagian Barat Menurut *Klassen Typologi*, 1987-1995

PDRB perkapita (y) Laju Pertumbuhan (r)	$y_1 > y$	$y_1 < y$
$r_1 > r$	<b>Daerah Maju dan Tumbuh cepat</b>  Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Barat	<b>Daerah Berkembang Cepat</b>  Lampung
$r_1 < r$	<b>Daerah Maju Tapi Tertekan</b>  Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan	<b>Daerah Relatif Tertinggal</b>  Jambi dan Bengkulu

dimana :  $r_1$  = Laju pertumbuhan PDRB di Propinsi 1

$y_1$  = Pendapatan per kapita Propinsi 1

$r$  = Laju pertumbuhan PDRB

$y$  = Pendapatan per kapita rata-rata

Untuk perhitungan ketimpangan digunakan *Indeks Ketimpangan Williamson* dengan formulasi sebagai berikut :

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - y)^2 \frac{f_i}{n}}}{y}$$

dimana:  $y_i$  = Pendapatan per kapita Propinsi ke  $i$

$y$  = Pendapatan per kapita rata-rata seluruh Propinsi

$f_i$  = Jumlah penduduk di Propinsi  $i$

$n$  = Jumlah penduduk wilayah Indonesia bagian barat



**Tendensi Indeks Ketimpangan Regional  
Wilayah Indonesia Bagian Barat, 1971 – 1999**

Tahun	Wilayah Indonesia Bagian Barat	Indonesia
1971	0,274	0,396
1972	0,252	0,406
1973	0,288	0,415
1974	0,366	0,483
1975	0,392	0,462
1976	0,323	0,415
1977	0,251	0,396
1978	0,185	0,429
1979	0,234	0,417
1980	0,275	0,425
1981	0,278	0,445
1982	0,257	0,438
1983	0,246	0,489
1984	0,247	0,515
1985	0,235	0,494
1986	0,201	0,474
1987	0,200	0,471
1988	0,205	0,465
1989	0,206	0,493
1990	0,193	0,484
1991	0,188	0,536
1992	0,182	0,535
1993	0,179	0,544

Hasil perhitungan pada penelitian ini dengan menggunakan data nilai PDRB tanpa migas, menunjukkan secara umum angka Indeks Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat (WIBB) ternyata lebih rendah dari pada angka untuk Indonesia secara keseluruhan. Kenyataan ini memberikan indikasi bahwa pemerataan pembangunan antar daerah di WIBB secara relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi rata-rata seluruh Indonesia.

## **2. Penelitian Hairul Aswadi dan Mudrajad Kuncoro (2002)**

Dari penelitian “Hairul Aswadi dan Mudrajad Kuncoro” mengenai “Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999”.

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui posisi perekonomian daerah-daerah di Kalimantan Selatan yang diukur melalui perbandingan tingkat pertumbuhan dan

pendapatan per kapita Kabupaten/Kota terhadap Propinsi Kalimantan Selatan.

- b. Mengenali subsektor ekonomi unggulan yang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian pada tiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
- c. Untuk mengetahui spesialisasi antardaerah dikawasan andalan, antar daerah kawasan andalan dengan kawasan bukan andalan, maupun antardaerah kawasan bukan andalan.
- d. Untuk mengetahui ketepatan penetapan kawasan andalan Kalimantan Selatan, dilihat dari kreteria prasaratannya.

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut digunakan alat analisis *Klassen Typologi*, *Location Quotient*, *Indeks Spesialisasi Regional*, Model Logit (*Binary Logistic Regression*), *Multinomial Logistic Regression*.

Alat analisis *Klassen Typologi* digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini membagi daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh, yang meliputi Kabupaten Kotabaru
2. Daerah maju tapi tertekan, meliputi Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin.
3. Daerah berkembang cepat, meliputi Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong.

4. Daerah relatif tertinggal, meliputi Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Untuk menentukan subsektor unggulan perekonomian daerah digunakan analisis LQ (*Location Quotient*). Pada analisis LQ menunjukkan bahwa seluruh Kabupaten/Kota baik yang berada dalam kawasan andalan maupun kawasan bukan andalan, memiliki nilai LQ yang lebih besar dari satu pada beberapa subsektor lapangan usaha. Artinya, semua Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Selatan memiliki subsektor unggulan dan penetapan kawasan andalan berdasarkan persyaratan sektor unggulan dapat dipandang cepat.

*Analisis Spesialisasi Regional* di gunakan untuk mengetahui tingkat spesialisasi antar daerah di Propinsi Kalimantan Selatan. Hasil perhitungan indeks spesialisasi menunjukkan adanya kenaikan nilai rata-rata indeks spesialisasi Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,11, yaitu dari 0,74 pada tahun 1993 menjadi 0,85 pada tahun 1999. Kenaikan nilai rata-rata indeks spesialisasi tersebut didorong oleh kenaikan rata-rata pada masing-masing daerah.

Analisis untuk membedakan kinerja perekonomian kawasan andalan dan kawasan digunakan model logit (*Binary Logistic Regression*), sedangkan untuk melihat alternatif pengklasifikasian daerah di Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, digunakan model *Multinomial Logistic Regression*. Berdasarkan hasil analisis logit, pengujian kecocokan model analisis menunjukkan bahwa pengujian model penuh dengan variabel bebas dibandingkan dengan konstanta terbukti secara statistik bahwa sejumlah variabel penjelas mampu membedakan kawasan andalan dan kawasan

bukan andalan. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai Chi-square = 12,86 dengan derajat kebebasan (3, N=60) yang signifikan dengan  $p < 0,01$ . Hasil analisis model logit kriteria Wald hanya variabel pendapatan per kapita yang dapat diandalkan untuk meramal kawasan andalan, dengan nilai statistik Wald sebesar 6,59 yang signifikan dengan  $p < 0,05$ . Hal tersebut berarti pendapatan per kapita memiliki pengaruh secara positif terhadap probabilitas suatu daerah berada pada kawasan andalan.

### 3. Penelitian Mardiyono (2000)

Dari penelitian "Mardiyono" mengenai "Kesenjangan Pembangunan Ekonomi di Propinsi Jawa Timur". Dalam penelitian ini ingin mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama kurun waktu 1986-1998 di Propinsi Jawa Timur dan daerah tingkat II yang ada di wilayah tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis sebagai berikut :

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan rumus :

$$r = [(PDRB_x - PDRB_{x-1}) / PDRB_{x-1}] \times 100\%$$

dimana : r = Laju pertumbuhan PDRB rata-rata per tahun

PDRB<sub>x</sub> = PDRB pada tahun akhir pengamatan

PDRB<sub>x-1</sub> = PDRB pada awal tahun pengamatan

#### 2. Pertumbuhan Struktur Ekonomi

Untuk mengidentifikasi perubahan struktur perekonomian dilakukan melalui perhitungan persentase kontribusi masing-masing sektor perekonomian daerah pada PDRB setiap tahun pengamatan digunakan rumus :

$$K_s = \text{Vas (Rp)} / \text{PDRB (Rp)} \times 100\%$$

dimana :  $K_s$  = Persentase kontribusi sektor t tahun i

$\text{Vas}$  = *Value added* (output) sektor t tahun i

### 3. Tingkat Kesenjangan

Untuk mengukur ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah dipergunakan *Indeks Williamson* dengan rumus sebagai berikut :

$$V_m = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - y)^2 \frac{f_i}{n}}}{y}$$

dimana :  $f_i$  = Populasi dari suatu wilayah tertentu / daerah tingkat II

$n$  = Populasi dari suatu wilayah Propinsi / daerah tingkat I

$y_i$  = Pendapatan per kapita daerah tingkat II wilayah pengamatan

$y$  = Pendapatan per kapita rata-rata Propinsi

Dan untuk melihat kesenjangan antar sektor di Propinsi Jawa Timur yaitu dengan diperbandingkan produktivitas tenaga kerja sektoral dengan menggunakan *Indeks Williamson* sebagai berikut :

$$V_m = \frac{\sqrt{\sum_i (P_i - P)^2 \frac{L_i}{L}}}{P}$$

dimana :  $P_i$  = Produktivitas tenaga kerja sektor i

$P$  = Rata-rata produktivitas tenaga kerja

$L_i$  = Jumlah tenaga kerja sektor i

$L$  = Jumlah tenaga kerja seluruh sektor

#### 4. Klasifikasi Pola Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Di analisis dengan *Klassen Typologi* sebagai berikut :

Klasifikasi Pola Pertumbuhan Ekonomi Daerah Menurut *Klassen Typologi*

PDRB perkapita ( $y$ )	$y_1 > y$	$y_1 < y$
Laju Pertumbuhan ( $r$ )		
$r_1 > r$	<b>Daerah Maju dan Tumbuh cepat</b>	<b>Daerah Berkembang Cepat</b>
$r_1 < r$	<b>Daerah Maju Tapi Tertekan</b>	<b>Daerah Relatif Tertinggal</b>

dimana :  $r_1$  = Laju pertumbuhan PDRB di Propinsi 1

$y_1$  = Pendapatan per kapita Propinsi 1

$r$  = Laju pertumbuhan PDRB

$y$  = Pendapatan per kapita rata-rata

Hasil analisis data untuk pertumbuhan dan peranan PDRB daerah tingkat II di Propinsi Jawa Timur pada dasarnya kontribusi PDRB yang terbesar terdapat di daerah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan yaitu sebesar 41% kegiatan ekonomi diwilayah tersebut. Untuk pola pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan *Klassen Typologi* pada tahun 1990 adalah sebagai berikut : Sidoarjo, Gresik, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya termasuk daerah yang maju dan tumbuh cepat. Untuk daerah berkembang cepat meliputi 3 Kabupaten yaitu Malang, Jombang, Sampang dan 3 Kota meliputi Blitar, Pasuruan, Madiun. Sedangkan daerah yang lainnya pada tahun 1990 termasuk dalam daerah relatif tertinggal.

Pada perhitungan *Indeks Williamson* tentang kesenjangan antar daerah di Propinsi Jawa Timur mengalami peningkatan pada tahun 1990 yaitu sudah mencapai angka 1. Untuk melukiskan kesenjangan sektor secara keseluruhan dan dibitung dengan *Indeks Williamson*, bahwa secara umum kesenjangan antar sektor masih sangat tinggi yang ditunjukkan dengan perkembangan Indeks Ketimpangan sektoral yang nilainya 0,655 – 0,840.

#### 4. Penelitian Okta Rosadinata ( 2004 )

Mengenai “Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar kabupaten/kota di propinsi Jawa Timur”. Dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana klasifikasi struktur perekonomian dan produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita di propinsi jawa timur, seberapa besar tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di propinsi jawa timur, apakah dapat dibuktikan hipotesis kuznets tentang “U” terbalik di propinsi jawa timur selama kurun waktu 1995 – 2002. dalam penelitian ini menggunakan alat analisis sebagai berikut :

##### 1. Tipologi Daerah

Untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan mengklasifikasi menjadi empat Daerah *high growth and high income* meliputi dua Kabupaten : Gresik dan Sidoarjo, enam Kota : Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Madiun, Blitar, Surabaya, Kediri, daerah *high income but low growth* meliputi dua Kota : Malang dan Probolinggo, daerah *high growth but low income* meliputi lima Kabupaten : Tulungagung, Ponorogo, Malang, Blitar, Bondowoso, daerah *low growth and low income* meliputi 22 Kabupaten : Pacitan,

Trenggalek, Kediri, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep dan satu Kota Batu.

## 2. Indeks Ketimpangan Willianson

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota yang terjadi di propinsi Jawa timur pada tahun 1995 – 2002, dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan Regional (Regional in equality) yang dinamakan dengan indeks ketimpangan Willianson. Hasil dari perhitungan indeks ketimpangan williamson pada propinsi Jawa Timur tahun 1995-2002 yaitu :

### Indeks Ketimpangan Williamson

#### Propinsi Jawa Timur

1995-2002

Tahun	Indeks Williamson
1995	0,9446
1996	0,9537
1997	0,9788
1998	0,9652
1999	0,9501
2000	0,9957
2001	0,9970
2002	0,9510
rata-rata	0,9670



### 3. Indeks Ketimpangan Theil

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto propinsi Jawa Timur dapat menggunakan indeks ketimpangan Theil. Dengan menggunakan alat analisis indeks ketimpangan theil dapat diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi di propinsi jawa timur. Hasil dari indeks Ketimpangan Theil Propinsi Jawa Timur tahun 1995-2002 adalah :

#### Indeks Ketimpangan Williamson

#### Propinsi Jawa Timur

1995-2002

Tahun	Indeks Theil
1995	0,4429
1996	0,4495
1997	0,4676
1998	0,4798
1999	0,4752
2000	0,4963
2001	0,4895
2002	0,4511
rata-rata	0,4690

### 4. Korelasi Pearson

Korelasi pearson adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Analisis ini didapatkan nilai yang negatif yaitu  $-0,0760$  dan  $-0,4235$  nilai

negatif menunjukkan bahwa adanya korelasi negatif antara pertumbuhan PDRB dan indeks ketimpangan williamsn maupun indeks ketimpangan theil.

#### 5. Pembuktian Hipotesis Kuznets

Hipotesis Kuznets dapat dibuktikan dengan membuat grafik antara pertumbuhan produk domestik dan indeks ketimpangan. Grafik tersebut merupakan hubungan antara pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) dengan indeks ketimpangan Williamson maupun ketimpangan Theil (Mudrajad Kuncoro, 2004 :137). Hasil dari hipotesis ini terdapat Grafik yang menunjukkan bentuk “u” terbalik, hal ini dapat dikatakan berlaku di Propinsi Jawa Timur.

## BAB IV

### LANDASAN TEORI

#### 4.1 Arti Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (*Lincoln Arsyad, 1997 : 11*).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Output total riil suatu perekonomian bisa juga tetap konstan atau mengalami penurunan sepanjang waktu. Ini berarti perekonomian statis atau mengalami penurunan (stagnasi). Perubahan ekonomi meliputi baik pertumbuhan, statis ataupun stagnasi pendapatan nasional riil. Penurunan merupakan perubahan negatif, sedangkan pertumbuhan merupakan perubahan positif (*Faried Wijaya, 1990 : 262*).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini dapat dilihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu (*Boediono, 1985 : 1*).

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Ada dua sisi hal yang perlu diperhatikan yaitu sisi output totalnya dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output per kapita, tidak bisa tidak, harus dianalisa dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak, dan jumlah penduduk dilain pihak (*Boediono, 1985 : 1*).

Aspek yang ketiga dari definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka panjang. Kenaikan output per kapita selama satu atau dua tahun, yang kemudian diikuti dengan penurunan output per kapita bukan pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mengalami kenaikan output per kapita (*Boediono, 1985 : 2*).

#### **4.2 Sumber – Sumber Pertumbuhan Ekonomi**

Ada beberapa sumber strategis dan dominan yang menentukan pertumbuhan ekonomi tergantung bagaimana mengklasifikasikannya. Salah satu mengklasifikasikannya menjadi faktor-faktor fisik dan faktor-faktor manajemen yang mempengaruhi sumber-sumber tersebut. Meskipun dipunyai sumber dominan untuk pertumbuhan yang kuantitasnya cukup banyak serta dengan kualitas cukup tinggi tetapi bila manajemen penggunaannya tidak menunjang maka laju pertumbuhan ekonominya rendah (*Faried Wijaya, 1990 : 264*).

Faktor pertumbuhan berupa faktor-faktor fisik sumber-sumber daya alami, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, jumlah barang-barang kapital dan teknologi. Keempat faktor ini disebut faktor-faktor penawaran dalam pertumbuhan ekonomi. Tersedianya lebih banyak dan lebih baik sumber-sumber

alami dan manusia, barang kapital, serta tingkat pengetahuan teknologi yang lebih tinggi memungkinkan perekonomian memproduksi jumlah output lebih besar (*Faried Wijaya, 1990 : 264*).

Faktor manajemen penggunaan sumber-sumber dalam pertumbuhan ekonomi merupakan aspek permintaan dan aspek alokasi sumber daya. Aspek permintaan berarti agar sumber-sumber daya yang ada dan terus bertambah dapat digunakan sepenuhnya, maka dibutuhkan pertumbuhan tingkat permintaan agregatif yang mencukupi. Menggunakan semua sumber daya dan kapital serta teknologi yang ada saja tidaklah cukup. Sumber-sumber tersebut haruslah digunakan sedemikian rupa sehingga dapat diproduksi jumlah output maksimum dengan menggunakan sumber daya tersebut (*Faried Wijaya, 1990 : 264*).

#### **4.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Jadi teori pertumbuhan ekonomi tidak lain adalah suatu *ceritera* (yang logis) mengenai bagaimana proses pertumbuhan terjadi (*Boediono, 1985 : 2*).

Satu hal yang perlu ditekankan sejak awal adalah bahwa didalam ilmu ekonomi tidak hanya terdapat satu teori pertumbuhan, tetapi terdapat banyak teori pertumbuhan. Sampai saat ini (dan masa mendatang) tidak ada suatu teori pertumbuhan yang menyeluruh dan lengkap dan yang merupakan satu-satunya teori pertumbuhan yang baku. Berbagai ekonom besar, sejak lahirnya ilmu

ekonomi mempunyai pandangan atau persepsi yang tidak selalu sama mengenai proses pertumbuhan suatu perekonomian. Sering kali pandangan atau persepsi ini sangat dipengaruhi oleh keadaan atau peristiwa-peristiwa pada waktu ekonom tersebut hidup. Seringkali pula teori pertumbuhan seorang ekonom dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh ekonom, sehingga aspek-aspek yang ditonjolkan dalam teorinya mencerminkan kecenderungan ideologisnya. Ini semua perlu dipahami oleh setiap orang yang mempelajari teori pertumbuhan (ilmu ekonomi umumnya). Jangan sampai berpendapat bahwa teori yang kebetulan pelajari adalah satu-satunya kebenaran yang tidak bisa dibantah. Semakin banyak teori yang di pelajari, semakin luas pandangan, dan semakin mudah menghindari perangkat fanatisme intelektual tersebut (Boediono, 1985 : 2).

#### 4.3.1 Teori – Teori Klasik

##### 4.3.1.1 Adam Smith

Adam Smith (1723 – 1790), yang terkenal dengan teori nilainya yaitu teori yang menyelidiki faktor-faktor yang menentukan nilai atau harga suatu barang. Tetapi didalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations* (1776) secara singkat sering disebut sebagai *Wealth of Nations*, bisa dilihat bahwa tema pokoknya adalah mengenai bagaimana perekonomian (kapitalis) tumbuh. Dalam buku tersebut Smith, mungkin orang yang pertama yang mengungkapkan proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Oleh sebab itu, teori Adam Smith sering dianggap

sebagai awal dari pengkajian masalah pertumbuhan secara sistematis (Boediono, 1985 : 7).

Boediono, 1985 : 7, Menurut Adam Smith, ada dua aspek utama dari pertumbuhan ekonomi yaitu :

- a. Pertumbuhan Output (GDP) total
- b. Pertumbuhan Penduduk

Dalam pertumbuhan output Adam Smith melihat sistem produksi suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok yaitu :

- a. Sumber-sumber alam yang tersedia (atau faktor produksi tanah)
- b. Sumber-sumber manusiawi (jumlah penduduk)
- c. Stok barang kapital yang ada

Menurut Smith, sumber-sumber alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber-sumber alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan perekonomian tersebut. Artinya, selama sumber-sumber ini belum sepenuhnya dimanfaatkan, yang memegang peranan dalam proses produksi adalah dua unsur produksi yang lain, yaitu jumlah penduduk dan stok kapital yang ada. Dua unsur lain inilah yang menentukan besarnya output masyarakat dari tahun-ketahun. Tetapi apabila output terus meningkat, sumber-sumber alam akhirnya akan sepenuhnya dimanfaatkan (dieksploitir), dan pada tahap ini sumber-sumber alam akan membatasi output. Unsur sumber alam ini akan

menjadi batas atas dari pertumbuhan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi (dalam arti pertumbuhan output dan pertumbuhan penduduk) akan berhenti apabila batas atas ini dicapai (*Boediono, 1985 : 8*).

Unsur yang kedua adalah sumber-sumber manusiawi atau jumlah penduduk. Dalam proses pertumbuhan output unsur ini dianggap peranan yang pasif, dalam arti bahwa jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari masyarakat tersebut. Apabila stok kapital yang tersedia membutuhkan, misalnya, 1 juta orang untuk menggunakannya, dan apabila jumlah tenaga kerja yang tersedia adalah 900 ribu orang, maka jumlah penduduk akan cenderung meningkat sehingga tenaga kerja yang tersedia akhirnya menjadi 1 juta orang. Pada tahap ini, bisa di anggap bahwa berapapun jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi akan tersedia lewat proses pertumbuhan (atau penurunan) penduduk. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses pertumbuhan penduduk itu sendiri.

Dalam model Smith tinggalah unsur produksi yang ketiga, yaitu stok kapital, yang secara aktif menentukan tingkat output. Smith memang memberikan peranan sentral kepada pertumbuhan stok kapital atau akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan output. Apa yang terjadi dengan tingkat output tergantung pada apa yang terjadi pada stok kapital, dan laju pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok kapital (tentu saja sampai tahap pertumbuhan dimana sumber-sumber alam mulai membatasi) (*Boediono, 1985 : 9*).



#### 4.3.1.2 David Ricardo

David Ricardo (1772–1823) mengembangkan teori pertumbuhan Klasik lebih lanjut. Pengembangan ini berupa penjabaran model pertumbuhan menjadi suatu model yang lebih tajam, baik dalam konsep-konsep yang dipakai maupun dalam hal mekanisme proses pertumbuhan itu sendiri. Namun perlu ditekan lagi disini bahwa garis besar dari proses pertumbuhan dan kesimpulan-kesimpulan umum yang ditarik oleh Ricardo tidak terlalu berbeda dengan teori Adam Smith. Tema dari proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Kesimpulan umumnya masih tetap bahwa dalam perpacuan tersebut penduduklah yang akhirnya menang, dan dalam jangka panjang perekonomian akan mencapai posisi stationer. Seperti juga dengan Adam Smith, Ricardo menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (yaitu, sumber-sumber alam) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya bertindak sebagai faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat (*Boediono, 1985 : 17*).

Perbedaan terutama terletak pada penggunaan alat analisa mengenai distribusi pendapatan (berdasarkan teori Ricardo mengenai sewa tanah) dalam penjabaran mekanisme pertumbuhan dan pengungkapan peranan yang lebih jelas dari sektor pertanian diantara sektor-sektor lain dalam proses pertumbuhan (*Boediono, 1985 : 17*).

Perekonomian Ricardo ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Tanah terbatas jumlahnya
- b. Tenaga kerja (penduduk) yang meningkat (atau menurun) sesuai dengan apakah tingkat upah diatas atau dibawah tingkat upah minimal (yang oleh Ricardo disebut tingkat upah alamiah *natural wage*)
- c. Akumulasi kapital terjadi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik kapital berada diatas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi
- d. Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi
- e. Sektor pertanian dominan

Dengan terbatasnya tanah, maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menghasilkan produk marginal (*marginal product*) yang semakin menurun. Ini tidak lain adalah hukum produk marginal yang makin menurun atau lebih terkenal dengan nama *the Law of Diminishing Return*. Selama buruh yang dipekerjakan pada tanah tersebut bisa menerima tingkat upah diatas tingkat upah alamiah, maka penduduk (tenaga kerja) akan terus bertambah, dan ini akan menurunkan lagi produk marginal tenaga kerja, dan selanjutnya menekan kebawah tingkat upah. Proses ini akan berhenti apabila tingkat upah turun pada tingkat upah alamiah. Apabila, misalnya, tingkat upah ternyata turun dibawah tingkat upah alamiah, maka jumlah penduduk (tenaga kerja) menurun. Dan tingkat upah akan naik kembali pada tingkat alamiah. Pada posisi

ini jumlah penduduk konstan. Jadi dari segi faktor produksi tanah dan faktor produksi tenaga kerja, ada satu kekuatan dinamis yang selalu menarik perekonomian ke arah upah tingkat minimum, yaitu bekerjanya *The Law of Diminishing Return* (Boediono, 1985 : 18).

*The Law of Diminishing Return* berbunyi : “ apabila salah satu input tetap, sedang input-input lain ditambah penggunaannya (variabel) maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap unit tambahan input variabel tersebut mula-mula menaik, akan tetapi kemudian seterusnya menurun, apabila input variabel tersebut terus ditambah (Boediono, 1985 : 18).

#### 4.3.1.3 Arthur Lewis

Boediono, 1985 : 35, Salah satu perumusan yang terkenal dari teori Klasik dalam konteks permasalahan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang diungkapkan oleh ekonom zaman modern Arthur Lewis. Model pertumbuhan dengan suplay tenaga kerja yang tak terbatas merupakan model pertumbuhan Arthur Lewis. Pokok permasalahan yang dikaji oleh Lewis adalah bagaimana proses pertumbuhan terjadi dalam perekonomian dua sektor :

- a. Sektor tradisional, dengan produktivitas rendah dan sumber tenaga kerja yang melimpah
- b. Sektor modern, dengan produktivitas tinggi dan sebagai sumber akumulasi kapital

Proses pertumbuhan ekonomi terjadi apabila tenaga kerja bisa dipertemukan dengan kapital. Lewis memberikan teori mengenai proses pertemuan kedua faktor produksi ini dan proses pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan.

Pada saat sektor modern mempunyai sejumlah stok barang kapital tertentu. Sektor ini menggunakan tenaga kerja yang akan diberi upah sesuai dengan marginal produknya. Dengan stok kapital tertentu tersebut, maka bisa digambarkan marginal product bagi tenaga kerja yang dipekerjakan pada sektor ini (*Boediono, 1985 : 35*).

Ciri-ciri utama dari sektor tradisional yaitu produktivitas yang rendah dan tenaga kerja yang berlimpah. Ini berarti bahwa tingkat upah di sektor ini berada pada tingkat subsistensi (ini sejalan dengan teori-teori Klasik Smith, Malthus dan Ricardo), dan pada tingkat upah ini suplai tenaga kerja yang bersedia untuk bekerja berlimpah (artinya, apabila ada seorang pengusaha yang bersedia mempekerjakan buruh dengan tingkat upah subsistensi ini, maka bisa memperoleh jumlah buruh berapapun yang diperlukan) (*Boediono, 1985 : 37*).

#### **4.3.2 Teori – Teori Modern**

##### **4.3.2.1 Harrod – Domar**

Teori Harrod – Domar adalah perkembangan langsung dari teori makro Keynes jangka pendek menjadi suatu teori makro jangka panjang. Aspek utama yang dikembangkan dari teori Keynes adalah aspek yang menyangkut peranan investasi dalam jangka panjang. Dalam teori

Keynes, pengeluaran investasi mempengaruhi permintaan agregat tetapi tidak mempengaruhi penawaran agregat. Harrod – Domar melihat pengaruh investasi dalam perspektif waktu yang lebih panjang. Menurut kedua ekonom ini, pengeluaran investasi tidak hanya mempunyai pengaruh (lewat proses multiplier) terhadap permintaan agregat, tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang ini, investasi menambah stok kapital (misalnya, pabrik-pabrik, jalan-jalan, dan sebagainya) (*Boediono, 1985 : 59*).

Hubungan antara stok kapital dengan penawaran agregat adalah setiap penambahan stok kapital masyarakat meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output. Output yang dimaksud adalah output yang potensial bisa dihasilkan dengan stok kapital (kapasitas pabrik) yang ada (*Boediono, 1985 : 60*).

Laju pertumbuhan natural dalam sistem Harrod yang sederhana adalah persentase pertumbuhan satuan tenaga kerja efisien per tahun; sebagai kondisi (syarat) pertumbuhan seimbang maka output dan kapital harus juga tumbuh dengan laju pertumbuhan natural yang sama (*Boediono, 1985 : 68*).

#### **4.3.2.2 Solow – Swan**

Robert Solow dan Trevor Swan secara sendiri-sendiri mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang sekarang sering disebut dengan nama model pertumbuhan Neo Klasik. Model Solow dan

Swan memusatkan perhatiannya pada pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Boediono, 1985 : 81).

Kerangka umum dari model Solow-Swan mirip dengan model Harrod-Domar, tetapi model Solow-Swan lebih luwes karena,

- a. Menghindari masalah ketidakstabilan yang merupakan ciri *warranted rate of growth* dalam model Harrod-Domar.
- b. Bisa lebih luwes digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah distribusi pendapatan.

Keluwesannya ini terutama disebabkan oleh karena Solow dan Swan menggunakan bentuk fungsi produksi yang lebih mudah dimanipulasikan secara aljabar (Boediono, 1985 : 81).

Ada empat anggapan yang melandasi model *Neo Klasik* (Boediono, 1985 : 83):

- a. Tenaga kerja (penduduk), tumbuh dengan laju tertentu
- b. Adanya fungsi produksi yang berlaku bagi setiap periode.
- c. Adanya kecenderungan untuk menabung *propensity to save* oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi tertentu dari output.
- d. Semua tabungan masyarakat di investasikan.

Untuk keseimbangan jangka panjang Solow mengatakan bahwa posisi *long run equilibrium* akan tercapai apabila kapital per kapita, mencapai suatu tingkat yang stabil, artinya tidak lagi berubah nilainya.

Apabila kapital konstan, maka *long run equilibrium* tercapai. Hal ini merupakan ciri posisi keseimbangan yang pertama (Boediono, 1985 : 88).

Ciri yang kedua adalah mengenai laju pertumbuhan output, kapital dan tenaga kerja. Pada posisi *long run equilibrium* laju pertumbuhan output bisa disimpulkan dari ciri bahwa output per kapita adalah konstan dan penduduk tumbuh sesuai dengan asumsi. Definisi output per kapita adalah output total tumbuh dengan laju jumlah penduduk per tahun (Boediono, 1985 : 90).

Ciri yang ketiga adalah mengenai stabilitas dari posisi keseimbangan tersebut. Posisi keseimbangan model Solow-Swan bersifat stabil, dalam arti bahwa apabila kebetulan perekonomian tidak pada posisi keseimbangan, maka akan ada kekuatan-kekuatan yang cenderung membawa kembali perekonomian tersebut pada posisi keseimbangan jangka panjang (Boediono, 1985 : 91).

Ciri yang keempat menyangkut tingkat konsumsi dan tingkat tabungan (investasi). Tingkat tabungan (investasi) per kapita pada posisi keseimbangan adalah konstan. Apa yang tidak ditabung dikonsumsi, sehingga konsumsi per kapita juga konstan pada posisi equilibrium (Boediono, 1985 : 93).

Ciri yang kelima berkaitan dengan imbalan yang diterima oleh masing-masing faktor produksi atau aspek distribusi pendapatan. Karena hanya ada dua macam faktor produksi (kapital dan tenaga kerja), maka

output total akan habis terbagi antara para pemilik kapital dan pemilik faktor produksi tenaga kerja (*Boediono, 1985 : 93*).

#### 4.3.2.3 Schumpeter

Joseph Schumpeter hidup di zaman modern (1883-1950). Dari segi teori Schumpeter bisa digolongkan dalam kelompok teori pertumbuhan Klasik. Namun dari segi kesimpulannya khususnya mengenai prospek perbaikan hidup masyarakat banyak dalam perekonomian kapitalis. Berbeda dengan ekonom-ekonom Klasik sebelumnya, ia optimis bahwa dalam jangka panjang tingkat hidup orang banyak bisa ditingkatkan terus sesuai dengan kemajuan teknologi yang bisa dicapai masyarakat tersebut. Sejalan juga dengan para ekonom modern, Schumpeter tidak terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan penduduk maupun aspek keterbatasan sumber daya alam dalam pertumbuhan ekonomi. Bagi Scumpeter, masalah penduduk tidak dianggap sebai aspek sentral dari proses pertumbuhan ekonomi (*Boediono, 1985 : 47*).

Schumpeter berpendapat bahwa motor penggerak perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang di beri nama *inovasi*, dan para pelakunya adalah para wiraswasta atau *inovator* atau *entrepreneur*. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterangkan dengan adanya *inovasi* oleh para *entrepreneur* (*Boediono, 1985 : 47*).

Gambaran umum dari proses kemajuan ekonomi menurut Schumpeter adalah membedakan antara pengertian pertumbuhan



ekonomi dan pengertian perkembangan ekonomi. Keduanya adalah sumber dari peningkatan output masyarakat, tetapi masing-masing mempunyai sifat yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi di artikan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau teknologi produksi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi adalah satu sumber kenaikan output, sedangkan perkembangan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh *inovasi* yang dilakukan oleh para wiraswasta. *Inovasi* berarti perbaikan teknologi dalam arti luas mencakup penemuan produk baru, pembukaan pasar baru dan sebagainya. Tetapi yang penting adalah bahwa *inovasi* menyangkut perbaikan kualitatif dari sistem ekonomi itu sendiri, yang bersumber dari kreativitas para wiraswastanya (Boediono, 1985 : 48).

Perkembangan ekonomi berawal pada suatu lingkungan sosial, politik dan teknologi yang menunjang kreativitas para wiraswasta. Dengan adanya lingkungan yang menunjang kreativitas, maka akan timbul beberapa wiraswasta yang menjadi pioner dalam mencoba menerapkan ide-ide baru dalam kehidupan ekonomi (cara berproduksi baru, produk baru, bahan mentah dan sebagainya). Mungkin tidak semua pioner usaha akan berhasil tetapi mereka yang berhasil dikatakan telah melakukan inovasi. (Boediono, 1985 : 50).

Inovasi mempunyai tiga pengaruh. Yang pertama adalah diperkenalkannya teknologi baru, yang kedua adalah inovasi menimbulkan keuntungan lebih (keuntungan monopolistis) yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital. Yang ketiga adalah inovasi pada tahap-tahap selanjutnya akan diikuti oleh timbulnya proses imitasi yaitu adanya pengusaha baru yang meniru teknologi baru tersebut. Proses imitasi ini akan diikuti oleh investasi (akumulasi kapital) oleh para imitator tersebut. Proses imitasi ini mempunyai pengaruh berupa :

- a. Menurunnya keuntungan monopolistis yang dinikmati oleh para inovator.
- b. Penyebaran teknologi baru didalam masyarakat (teknologi tersebut tidak lagi menjadi monopoli para inovatornya).

Ke semua proses ini meningkatkan output masyarakat dan secara total merupakan proses perkembangan ekonomi. Keuntungan yang diperoleh dari adanya inovasi akan turun dan hilang akibat disaingi oleh para penirunya. Jadi inovasi dan keuntungan yang diperoleh darinya merupakan motor penggerak dinamika dalam masyarakat kapitalis atau perekonomian pasar (*Boediono, 1985 : 51*).

#### **4.4 Definisi Ketimpangan**

Ketimpangan adalah mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Pada tingkat ketimpangan maksimum, kekayaan hanya dimiliki satu

orang saja, dan tingkat ketimpangan sangat tinggi ( *Mudrajat Kuncoro, 1997 : 103*).

Menurut beberapa pakar pembangunan, seperti Fei dan Ranis (1964), Kuznets (1996), Adewlman dan Morris, berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan ditentukan oleh jenis pembangunan ekonomi, yang ditunjukkan oleh ukuran negara, dasar sumber daya alam, dan kebijakan yang dianut. Dengan kata lain, faktor kebijakan dan dimnsi struktural perlu diperhatikan selain laju pertumbuhan ekonomi ( *Mudrajat Kuncoro, 1997 : 111* ).

Feids ( 980 ) menemukan fakta yang menarik tentang ketimpangan adalah sebagai berikut ( *Mudsrajad Kumcoro, 1997 : 112* ) :

1. Negara yang mengalami kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan ternyata kurang lebih sama dengan bayaknya negarayang mengalami penurunan ketimpangan pendapatan.
2. Kemiskinan absolut memurun dikebayakan negara.
3. Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan bayak yang brejalan beriringan.

#### **4.5 Kebijakan Ekonomi dan Ketimpangan**

Menurut Hipotesis U terbalik, distribusi pendapatan yang merata memerlukan pertumbuhan yang cepat dalam jangka panjang sehingga tahap menurunnya ketimpangan dapat tercapai secepat mungkin. Akan tetapi kebijakan yang memaksimalkan pertumbuhan dapat berakibat buruk bagi pemerataan pendapatan dan pengikisan kemiskinan dalam jangka pendek, dan mungkin bisa saja timbul konflik kebijakan.

Hipotesis U terbalik sangat jauh dari sifat hukum besi, dan ketimpangan pendapatan sampai pada batas yang sangat luas disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak ada hubungannya dengan tingkat pendapatan perkapita. Walaupun demikian hipotesa mengandung unsur kebenaran yang penting, misalnya bahwa perubahan distribusi pendapatan untuk jangka yang sangat panjang sangat dipengaruhi arah perubahan struktural. Faktor-faktor yang menentukan perubahan struktural misalnya: elastisitas pendapatan, elastisitas harga, pertumbuhan produktivitas dan perubahan teknis, peningkatan ketersediaan faktor dan kebijakan dan strategi pembangunan (*Norman Gemmell, 1992 : 227-228*).

#### **4.6 Hipotesa U Terbalik Tentang Ketimpangan**

Negara miskin menghadapi masalah klasik : pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Isu mendasarnya adalah tidak hanya bagai mana meningkatkan pertumbuhan GNP namun juga siapa yang membuat kue nasional itu tumbuh, segelintir orang ataukah banyak orang. Bila pertumbuhan terutama disumbang oleh golongan kaya, maka merekalah yang paling mendapat manfaat dari pertumbuhan, sementara kemiskinan dan distribusi pendapatan semakin memburuk. Namun, bila pertumbuhan disumbang oleh banyak orang maka buah dari pertumbuhan ekonomi akan dirasakan secara lebih merata (*Mudrajad Kuncoro, 1997 : 101*).

Banyak perhatian telah diberikan terhadap bagaimana distribusi pendapatan berubah dalam proses pembangunan. Simon Kuznets (1955) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Kurva

Kuznets lebih banyak terdapat di negara dengan tingkat pendapatan tergolong menengah papan bawah (*Mudrajad Kuncoro, 1997 : 105*).

#### **4.7 Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hipotesis Simon Kuznets tentang U terbalik yang menyatakan bahwa awal mula pembangunan akan terjadi ketimpangan atau distribusi pendapatan yang tidak merata namun semakin lama dan mencapai tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan akan semakin merata. Dari hipotesis tersebut dapat diketahui bahwa adanya hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi.

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah ratio gini. Nilai ratio gini berkisar antara nol dan satu. Bila ratio gini sama dengan nol berarti distribusi pendapatan amat merata sekali karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Namun, apabila ratio gini sama dengan satu maka menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati satu orang saja (*Mudrajad Kuncoro, 1997 : 115*).

Williamson (1965) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap lebih matang, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampaknya adanya keseimbangan antardaerah dan disparitas berkurang dengan signifikan (*Mudrajad Kuncoro, 2004 : 133*).

Menurut Myrdal (1957), perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan *backwash effects* mendominasi pengaruh yang menguntungkan *spread effects* terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukan menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah (Mudrajad Kuncoro, 2004 : 133).

Ada teori yang mengatakan adanya *tradeoff* antara ketidakmerataan dan pertumbuhan. Namun kenyataan membuktikan ketidak merataan di negara yang sedang berkembang dalam dekade belakangan ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan rendah. Di negara yang sedang berkembang tidak ada *tradeoff* antara pertumbuhan dan ketidakmerataan. Ada berbagai cara pertumbuhan ekonomi mempengaruhi distribusi pendapatan. Menurut Fields (1990) mengenai ada tidaknya *tradeoff* antara pertumbuhan dengan pemerataan adalah tergantung jenis data yang digunakan apakah silang tempat *cross section*, runtut waktu *time series*, ataukah menggunakan data mikro (Mudrajad Kuncoro, 1997 : 110-111).

## **BAB V**

### **METODE PENELITIAN**

#### **5.1 Data Dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber data. Sumber data yang digunakan adalah Biro Pusat Statistik (BPS) dan berbagai data yang mendukung penelitian. Data yang diambil adalah data kurun waktu dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2002.

#### **5.2 Metode Analisis**

Untuk mencapai tujuan penelitian dan dapat membuktikan hipotesis Kuznets tentang U terbalik apakah berlaku di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Untuk mencapai tujuan tersebut alat yang digunakan adalah tipologi daerah, indeks ketimpangan Williamson, indeks ketimpangan Theil, korelasi person dan korelasi person.

##### **5.2.1 Tipologi Daerah**

Alat analisis *Tipologi Daerah* digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. *Tipologi Daerah* pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horisontal (*Mudrajad Kuncoro, 2004 : 118*).

Tabel 5.1  
Tipologi Daerah

PDRB per kapita (y) Laju Pertumbuhan (r)	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan tinggi	Pendapatan rendah dan pertumbuhan tinggi
$r_i < r$	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah	Pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah

Dimana :

- $r$  = Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kecamatan (%)
- $y$  = Rata-rata PDRB per kapita Kecamatan (Rupiah)
- $r_i$  = Pertumbuhan ekonomi Kecamatan yang diamati  $i$  (%)
- $y_i$  = PDRB per kapita Kecamatan yang diamati  $i$  (Rupiah)

Dengan menggunakan alat analisis ini dapat diperoleh empat kriteria yang digunakan untuk membagi daerah Kecamatan di Kabupaten Jombang Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*)  
Adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi di banding rata-rata Kecamatan di Kabupaten Jombang Jawa Timur.
2. Daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*)



Adalah daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata Kecamatan di Kabupaten Jombang Jawa Timur.

3. Daerah berkembang cepat (*high growth but low income*)

Adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata Kecamatan di Kabupaten Jombang Jawa Timur.

4. Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*)

Adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata Kecamatan Kabupaten Jombang Jawa Timur.

Disebut tinggi apabila indikator disuatu Kecamatan lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh Kecamatan di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Sedangkan digolongkan rendah apabila indikator di suatu Kecamatan lebih rendah dibandingkan rata-rata seluruh Kecamatan di Jombang Jawa Timur.

### 5.2.2 Indeks Ketimpangan Williamson

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar Kecamatan yang terjadi di Kabupaten Jombang Jawa Timur pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2002 dapat dianalisis dengan menggunakan Indeks Ketimpangan Regional (*regional in equality*) yang dinamakan dengan Indeks Ketimpangan Williamson adalah sebagai berikut (*Sjafrizal, 1997 : 31*):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - y)^2 \frac{f_i}{n}}}{y}$$

Di mana :

IW = Indeks Williamson

$y_i$  = PDRB per kapita di Kecamatan  $i$  (Rupiah)

$y$  = PDRB per kapita rata-rata Kabupaten Jombang  
Jawa Timur (Rupiah)

$f_i$  = Jumlah penduduk Kecamatan  $i$  (Orang)

$n$  = Jumlah penduduk Kabupaten Jombang Jawa Timur (Orang)

Dengan penghitungan angka Indeks Ketimpangan Williamson dapat diketahui tingkat ketimpangannya. Semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil dengan kata lain makin merata, sedangkan bila semakin jauh dari nol maka menunjukkan ketimpangan yang semakin besar atau dengan kata lain makin melebar (*Mudrajad Kuncoro, 2004 : 134*).

### 5.2.3 Indeks Ketimpangan Theil

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto Kabupaten dapat menggunakan Indeks Ketimpangan Theil. Dengan menggunakan alat analisis Indeks Ketimpangan Theil akan diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Metode Indeks Ketimpangan Theil adalah sebagai berikut (*Takahiro Akita, 2000 : 4-5*):

$$T_p = \sum_i \sum_j \left( \frac{Y_{ij}}{Y} \right) \log \left( \frac{Y_{ij}/Y}{N_{ij}/N} \right)$$

Di mana :

- $T_p$  = Indeks Ketimpangan Theil
- $Y_{ij}$  = PDRB per kapita Kecamatan ij di Kabupaten Jombang Jawa Timur (Rupiah)
- $Y$  = Total PDRB per kapita di Kabupaten Jombang Jawa Timur (Rupiah)
- $N_{ij}$  = Jumlah penduduk Kecamatan ij di Kabupaten Jombang Jawa Timur (Orang)
- $N$  = Jumlah penduduk di Kabupaten Jombang Jawa Timur (Orang)

Untuk mengetahui besarnya tingkat ketimpangan suatu daerah selain dapat memakai Indeks Ketimpangan Williamson juga dapat menggunakan Indeks Ketimpangan Theil. Indeks Ketimpangan Theil semakin membesar berarti menunjukkan ketimpangan yang semakin membesar, dan bila Indeks Ketimpangan Theil semakin kecil maka ketimpangan akan semakin rendah atau dengan kata lain semakin merata. Hal tersebut sejalan dengan Indeks Ketimpangan Williamson.

#### 5.2.4 Korelasi Pearson

Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan

diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur, dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. Koefisien korelasi dinyatakan dengan bilangan antara 0 (nol) sampai +1 atau 0 (nol) sampai -1. apabila koefisien korelasi (r) mendekati +1 atau -1 berarti terdapat hubungan yang kuat, sebaliknya apabila mendekati 0 (nol) berarti terdapat hubungan yang lemah atau tidak ada hubungan. Apabila r sama dengan +1 atau -1 berarti terdapat hubungan positif sempurna atau negatif sempurna (*Djarwanto dan Pangestu Subagyo, 1985 : 321-324*).

Untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan Kecamatan di Kabupaten Jawa Timur, dalam hal ini pertumbuhan PDRB dengan Indeks Williamson dan Indeks Ketimpangan Theil maka digunakan metode *Korelasi Pearson* (Pearson Product Moment) dengan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{\left( n \cdot \sum_{i=1}^n X_i Y_i \right) - \left( \sum_{i=1}^n X_i \right) \left( \sum_{i=1}^n Y_i \right)}{\sqrt{n \cdot \sum_{i=1}^n X_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n X_i \right)^2} \sqrt{n \cdot \sum_{i=1}^n Y_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n Y_i \right)^2}}$$

Di mana :  $-1 \leq r \leq +1$

(+) menunjukkan adanya korelasi positif

(-) menunjukkan adanya korelasi negatif

(0) menunjukkan tidak ada korelasi

### 5.2.5 Pembuktian Hipotesis Kuznets

Hipotesis Kuznets dapat di buktikan dengan membuat grafik antapertumbuhan produk domestik regional bruto dan indeks ketimpangan. Grafik tersebut merupakan hubungan antara pertumbuhan produk domestik regional bruto ( PDRB ) dengan indeks ketimpangan Theil ( Mudrajat Kuncoro, 2004 : 137 ).

Dengan membuat Grafik antara pertumbuhan PDRB dan Indeks ketimpangan di Propinsi Jawa Timur akan dapat membuktikan berlaku atau tidak hipotesis kuznets tentang “U” terbalik. Jika menunjukkan bentuk “U” terbalik berarti bahwa pada masa awal pertumbuhan ketimpangan memburuk dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan ketimpangan lagi dan akhirnya menurun lagi sehingga dapat dikatakan peristiwa tersebut seperti berulang kembali.

## BAB VI

### ANALISIS DATA

#### 6.1 Tipologi Daerah

Pengklasifikasian daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita daerah digunakan alat analisis Tipologi Daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata produk domestik bruto (PDRB) per kapita sebagai sumbu horisontal. Pada penelitian ini Kecamatan di Kabupaten Jombang Jawa Timur dapat dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu : Kabupaten/Kota yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), Kabupaten/Kota yang maju tapi tertekan (*high income but low growth*), Kabupaten/Kota yang berkembang cepat (*high growth but low income*), dan Kabupaten/Kota yang relatif tertinggal (*low growth and low income*).

Untuk mengetahui rata-rata PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi Kecamatan di Kabupaten Jombang Jawa Timur pada tahun 1995-2002 dapat dilihat pada tabel 6.1. Dalam tabel 6.1, Kecamatan Jombang menempati peringkat pertama rata-rata PDRB per kapita selama tahun 1995-2002. Sedangkan untuk rata-rata PDRB per kapita paling rendah adalah kabupaten Ngusikan. Selama tahun pengamatan rata-rata PDRB per kapita Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 930,31 dan rata-rata pertumbuhannya adalah 2,04%.

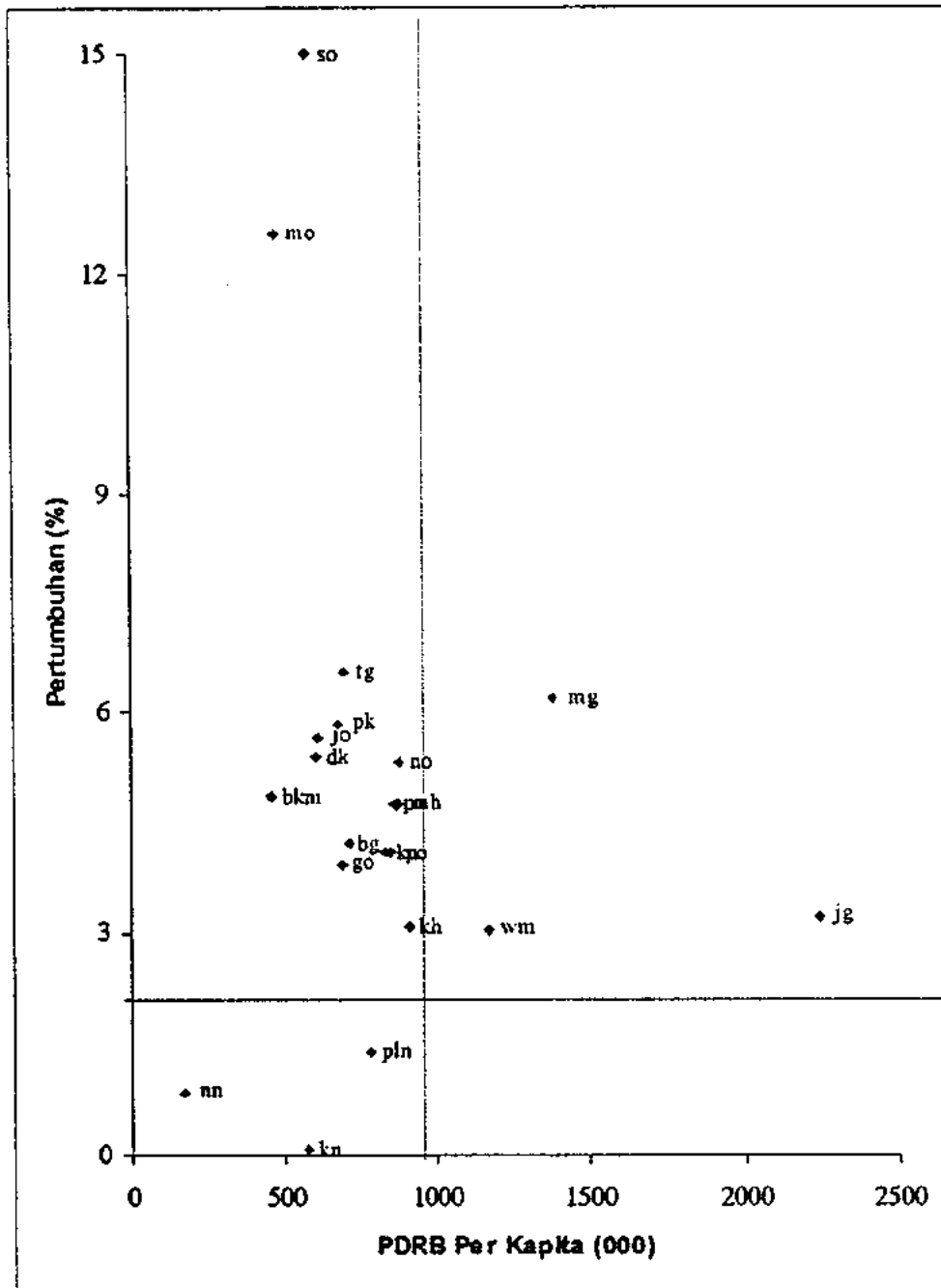
Tabel 6.1

Rata-Rata PDRB Per Kapita ( 000,Rp ) dan Pertumbuhan (%)  
Kecamatan di Kabupaten Jombang  
1995-2002

No.	Kabupaten/Kota	Simbol	Rata-Rata PDRB Per Kapita (000, Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5
1	Bandar Kedung Mulyo	bkm	461,37	4,86
2	Perak	pk	677,86	5,84
3	Gudo	go	689,14	3,94
4	Diwek	dk	608,69	5,39
5	Ngoro	no	877,56	5,33
6	Mojowarno	mo	479,94	12,55
7	Bareng	bg	713,67	4,22
8	Wonosalam	wm	1174,16	3,06
9	Mojoagung	mg	1381,99	6,17
10	Sumobito	so	586,48	15,00
11	Jogoroto	jo	615,14	5,63
12	Peterongan	pn	869,88	4,77
13	Jombang	jg	2238,96	3,22
14	Megaluh	mh	873,77	4,77
15	Tembelang	tg	697,26	6,54
16	Kesamben	kn	579,26	0,11
17	Kudu	ku	832,93	4,10
18	Ngusikan	nn	173,18	0,84
19	Ploso	po	850,05	4,09
20	Kabuh	kh	911,60	3,10
21	Plandaan	pln	784,57	1,38
	<b>Kabupaten Jombang</b>		<b>930,31</b>	<b>2,04</b>

Sumber : BPS Kabupaten Jombang (diolah)

Dari tabel 6.1, maka pola dan struktur perekonomian Kabupaten Jombang Jawa Timur dapat di klasifikasikan menjadi empat. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 6.1



Gambar 6.1 Pola dan struktur perekonomian Kabupaten Jombang Jawa Timur menurut Tipologi Daerah, 1995 - 2002



Dengan tipologi daerah, Kecamatan di Kabupaten Jombang Jawa Timur dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu (lihat gambar 6.1) :

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*)

adalah kecamatan Wonosalam, kecamatan Mojoagung, kecamatan Jombang.

Kecamatan yang termasuk kategori cepat maju dan cepat tumbuh, pada umumnya merupakan daerah yang sudah maju dari segi pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Disamping itu Kecamatan di Kabupaten Jombang Jawa Timur yang termasuk klasifikasi ini merupakan pusat industri, pabrik, perdagangan maupun pariwisata yang menjadi penyumbang terbesar produk domestik regional bruto (PDRB) daerah tersebut, kecamatan Wonosalam memiliki sumberdaya alam perkebunan cengkeh dan agro wisata sumber boto, kecamatan Mojoagung merupakan salah satu kecamatan tertua di kabupaten Jombang dan merupakan pintu masuk kabupaten Jombang dari arah timur, kecamatan Jombang merupakan Pusat kegiatan ekonomi dan administrasi Kabupaten Jombang.

2. Daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*)

untuk klasifikasi ini tidak terdapat di Kabupaten Jombang.

Kecamatan yang termasuk klasifikasi ini merupakan Kecamatan yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun mengalami pertumbuhan yang relatif kecil.

3. Daerah berkembang cepat (*high growth but low income*)

meliputi : kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kesanben, Kecamatan Plandaan.

Kecamatan yang termasuk dalam klasifikasi ini merupakan daerah yang merupakan potensi besar akan tetapi belum diolah secara baik. Jika potensi yang besar tersebut diolah dengan baik maka tingkat pendapatan Kecamatan tersebut bisa relatif tinggi. Dengan kata lain tingkat pertumbuhan yang relatif cepat akan tetapi pendapatannya masih dibawah rata-rata Kabupaten Jombang Jawa Timur, kecamatan Ngusikan terdapat terminal transportasi antar kota dan merupakan jalur propinsi, industri mainan yang berbasis pada kayu “ Mentari Toys “ terletak di kecamatan Kesamben serta, untuk kecamatan plandaan merupakan salah satu kecamatan tertua dan pusat kegiatan ekonomi untuk Kabupaten Jombang bagian utara.

4. Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*)

Meliputi 15 kecamatan yaitu Bandar Kedung Mulyo, Mojowarno, Sumobito, Diwek, Jogoroto, Gudo, Bareng, Perak, Tembelang, Kudu, Ploso, Peterongan, Megaluh, Ngoro, Kabuh.

Kecamatan yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah Kecamatan yang paling buruk keadaan dibandingkan dengan yang lain. Dari segi pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita relatif rendah dibandingkan dengan Kecamatan yang lain di Propinsi Jawa Timur, kecamatan dalam klasifikasi ini rata-rata terletak disekitar kecamatan yng terklasifikasi pada high growth and high income dan high growth and low income serta berada pada bagian selatan dan barat.

Dari pengklasifikasian yang menggunakan tipologi daerah dapat diketahui bahwa sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Jombang Jawa Timur termasuk dalam kategori daerah yang relatif tertinggal. Karena dari 21 Kecamatan di Kabupaten Jombang Jawa Timur terdapat 15 Kecamatan yang mempunyai pendapatan per kapita maupun pertumbuhan ekonomi dibawah rata-rata Kabupaten Jombang Jawa Timur. Sebagian besar daerah yang tergolong pada daerah yang relatif tertinggal tersebut kurang mendapatkan perhatian dari pemerintahan kabupaten sehingga pembangunan di daerah tersebut kurang bisa maksimal.

## 6.2 Indeks Ketimpangan Williamson

Untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang kondisi dan perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Jombang Jawa Timur, maka pemerataan PDRB per kapita antar Kecamatan dianalisis menggunakan indeks ketimpangan Williamson. Nilai indeks ketimpangan Williamson jika semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil pula atau dengan kata lain semakin merata, dan bila semakin jauh dari nol menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar.

Hasil perhitungan indeks ketimpangan Williamson antar Kecamatan di Kabupaten Jombang Jawa Timur pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2002 dapat dilihat pada tabel 6.2.

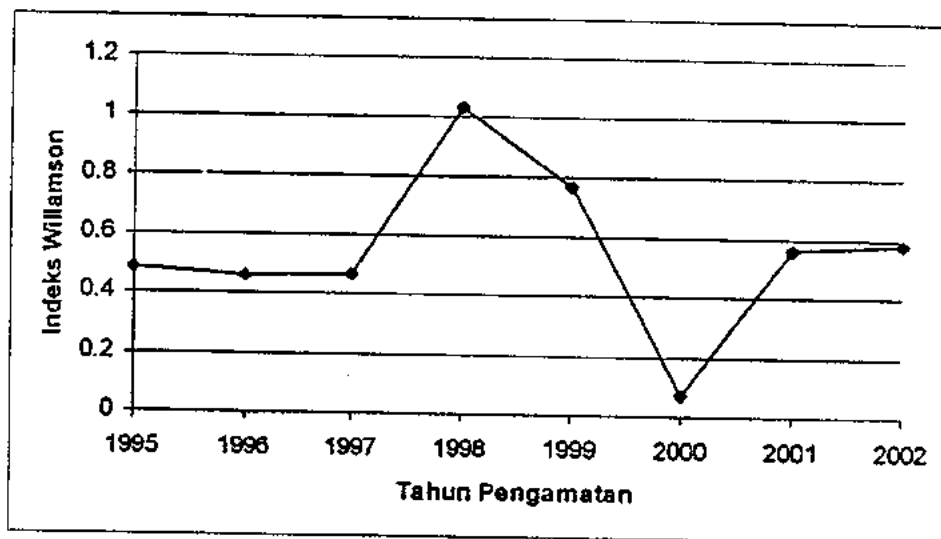
Tabel 6.2  
Indeks Ketimpangan Williamson  
Kabupaten Jombang,  
1995 – 2002

Tahun	Indeks Williamson
1995	0,4879
1996	0,4577
1997	0,4674
1998	1,0353
1999	0,7639
2000	0,0703
2001	0,5648
2002	0,5829
rata-rata	0,5538

Dari tabel 6.2 dapat diketahui bahwa nilai ketimpangan PDRB per kapita antar Kecamatan di Kabupaten Jombang Jawa Timur selama periode 1995-2002 sangatlah tinggi. Selama periode 1995-2002 rata-rata ketimpangan PDRB per kapita antar Kecamatan mencapai nilai 0,5538. Ketimpangan antar Kecamatan yang terjadi di

Kabupaten Jombang Jawa Timur dari tahun 1995-2002 cenderung menurun. Pada tahun 1995 nilai indeks ketimpangan Williamson sebesar 0,4879 turun menjadi 0,4577 pada tahun 1996, pada 1997 naik menjadi 0,4674, pada 1998 kembali naik menjadi 1,0353. Pada tahun 1999 indeks ketimpangan Williamson cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 1998 yaitu dari 1,0353 menjadi 0,7639, pada tahun 2000 turun menjadi 0,7603, pada tahun 2001 naik menjadi 0,5829, pada tahun 2002 turun menjadi 0,5538. Ketimpangan paling besar terjadi pada tahun 1998 yang mencapai nilai 1,0353.

Tingginya nilai indeks ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Jombang Jawa Timur tersebut disebabkan pembangunan yang terpusat pada daerah perkotaan dan hanya sebagian kecil pembangunan yang berorientasi pada kecamatan. Kecenderungan peningkatan ketimpangan yang terjadi di Propinsi Jawa Timur dapat dilihat pada gambar 6.2.



Gambar 6.2 Grafik Indeks Ketimpangan Williamson Kabupaten Jombang Jawa Timur 1995-2002.

Sumber : Tabel 6.2

Nilai indeks ketimpangan Williamson di Kabupaten Jombang yang cukup tinggi menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita antar Kecamatan mengalami ketimpangan. Dengan tingginya nilai indeks ketimpangan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita antar Kecamatan memberikan gambaran bahwa kondisi pembangunan daerah yang terjadi di Kabupaten Jombang Jawa Timur selama tahun pengamatan tidak merata atau terjadi ketimpangan.

Kecenderungan ketidakmerataan distribusi produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita antar Kecamatan di Kabupaten Jombang Jawa Timur dikarenakan pembangunan hanya terpusat pada daerah perkotaan (daerah yang lebih maju) dan sebagian kecil kecamatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut sebaiknya pemerintah Kabupaten Jombang Jawa Timur lebih bijaksana dan adil dalam pelaksanaan pembangunan antar Kecamatan agar tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan yang terjadi bisa berkurang.

### **6.3 Indeks Ketimpangan Theil**

Untuk mengetahui besarnya ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Jombang Jawa Timur dapat juga dianalisis menggunakan indeks ketimpangan Theil. Nilai indeks ketimpangan Theil jika semakin membesar berarti menunjukkan ketimpangan yang semakin membesar, dan bila indeks ketimpangan Theil semakin kecil maka ketimpangan akan semakin rendah atau dengan kata lain semakin merata.

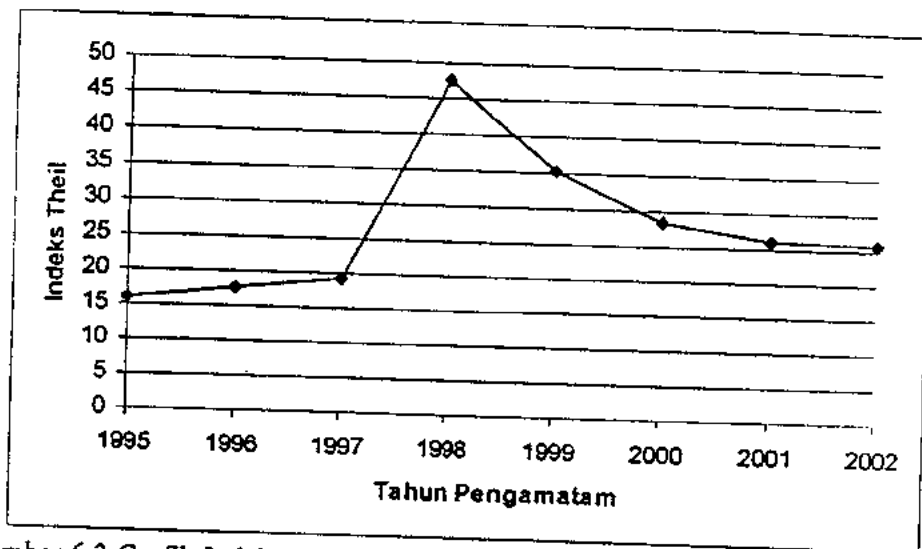
Hasil perhitungan indeks ketimpangan Theil antar Kecamatan di Kabupaten Jombang Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 6.3.

Tabel 6.3  
Indeks Ketimpangan Theil  
Kabupaten Jombang Jawa Timur,  
1995-2002

Tahun	Indeks Theil
1995	16,1252
1996	17,5488
1997	19,3413
1998	47,5805
1999	35,1677
2000	28,5000
2001	25,9716
2002	25,8926
rata-rata	27,0160

Dari hasil analisis didapatkan nilai indeks ketimpangan Theil periode tahun 1995-2002, rata-rata ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Jombang Jawa Timur sebesar 27,0160. Pada tahun 1995 nilai indeks ketimpangan Theil sebesar 16,1252 dan naik menjadi 17,5488 pada tahun 1998 sampai 2002 cenderung turun dari 47,5805 menjadi 25,8926. Nilai indeks ketimpangan Theil yang terbesar terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar 47,5805. Kecenderungan peningkatan nilai indeks terjadi pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1998, akan tetapi pada tahun 1999 sampai 2002 nilai indeks ketimpangan Theil mengalami penurunan dibanding tahun 1998.

Seperti indeks ketimpangan Williamson, indeks ketimpangan Theil juga menunjukkan kecenderungan peningkatan ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Jombang Jawa Timur pada tahun 1995-2002. Gambar yang menunjukkan kecenderungan peningkatan ketimpangan dapat juga dilihat pada gambar 6.3.



Gambar 6.3 Grafik Indeks Ketimpangan Theil Kabupaten Jombang Jawa Timur 1995-2002.

Sumber : Tabel 6.3

Dari hasil perhitungan indeks ketimpangan Theil di Kabupaten Jombang Jawa Timur menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan produk domestik regional bruto (PDRB) antar Kecamatan, hal tersebut sejalan dengan indeks ketimpangan Williamson. Kecenderungan peningkatan ketimpangan tersebut terlihat pada tahun 1998 yang menunjukkan pada tahun tersebut terjadi ketimpangan yang semakin besar nilainya maka semakin timpang. Akan tetapi pada tahun 1999 ketimpangan antar Kabupaten/Kota yang terjadi di Propinsi Jawa Timur semakin kecil atau semakin berkurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 1999 ketimpangan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita antar Kabupaten/Kota menjadi semakin merata.



#### 6.4 Korelasi Pearson

Untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Jombang Jawa Timur, dalam hal ini pertumbuhan PDRB dengan Indeks Williamson dan Indeks Ketimpangan Theil maka digunakan metode Korelasi Pearson (Pearson Product Moment). Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan.

Hasil perhitungan korelasi Pearson antara pertumbuhan ekonomi dan indeks ketimpangan Williamson serta indeks ketimpangan Theil dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.4  
Korelasi Pearson antara Pertumbuhan Ekonomi dan  
Indeks ketimpangan Williamson serta  
Indeks Ketimpangan Theil

Korelasi	Pertumbuhan PDRB
Indeks Ketimpangan Williamson	-0,7289
Indeks Ketimpangan Theil	-0,1646

Sumber : *Data diolah dari tabel 6.2 dan 6.3*

Dari hasil analisis korelasi Pearson antara pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan Williamson dan indeks ketimpangan Theil, didapatkan nilai yang negatif yaitu -0,7289 dan -0,1646 (Tabel 6.4). Nilai negatif tersebut menunjukkan bahwa adanya korelasi negatif antara pertumbuhan PDRB dan indeks ketimpangan Williamson maupun indeks ketimpangan Theil. Nilai koefisien korelasi yang

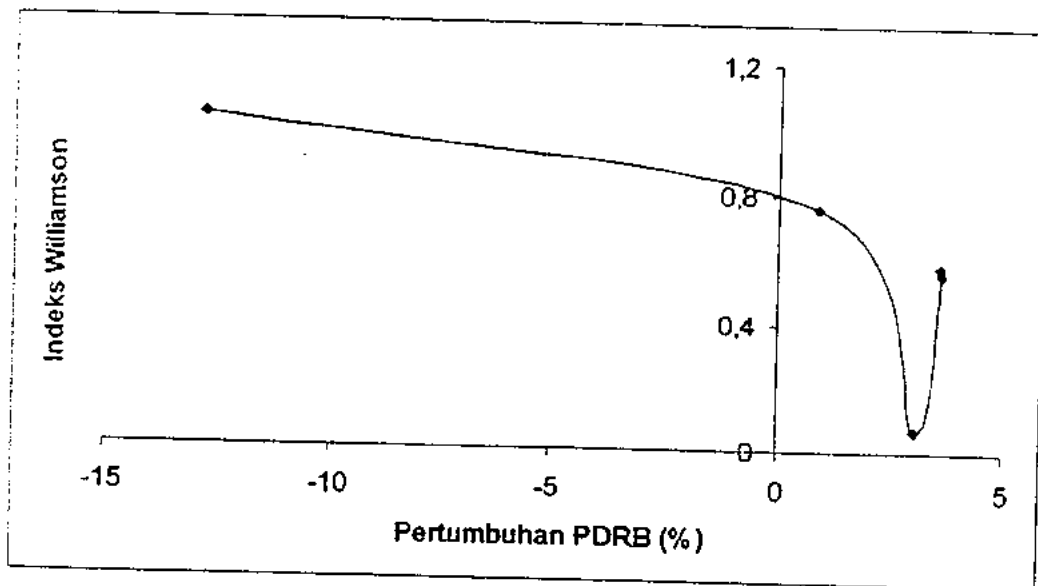
terdapat pada tabel 6.4 yaitu mendekati nol (0) berarti terdapat hubungan yang lemah antara pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan Williamson dan indeks ketimpangan Theil.

Dengan hasil pada tabel 6.4 menunjukkan adanya korelasi negatif hal ini berarti pertumbuhan PDRB di Kabupaten Jombang Jawa Timur mempunyai pengaruh yang negatif terhadap ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Pengaruh negatif yang dimaksud adalah jika terjadi kenaikan pertumbuhan PDRB maka akan menyebabkan indeks ketimpangan Williamson dan Theil mengalami penurunan. Dari pengertian tersebut dapatlah dijelaskan bahwa ketika pertumbuhan PDRB di Kabupaten Jombang Jawa Timur mengalami peningkatan maka akan menyebabkan tingkat ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Jombang Jawa Timur akan mengalami penurunan.

#### **6.5 Pembuktian Hipotesis Kuznets**

Dari gambar 6.2 dan 6.3, terlihat bahwa indeks ketimpangan Williamson dan indeks ketimpangan Theil menunjukkan kecenderungan peningkatan ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Jombang Jawa Timur dalam periode tahun 1995-2002. kecenderungan peningkatan ketimpangan tersebut belum dapat membuktikan berlakunya hipotesis Kuznets tentang "U" terbalik di Propinsi Jawa Timur. Hipotesis Kuznets dapat dibuktikan dengan membuat grafik antara pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) dan indeks ketimpangan. Grafik tersebut merupakan hubungan antara pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) dengan indeks ketimpangan Williamson maupun pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) dengan indeks ketimpangan Theil.

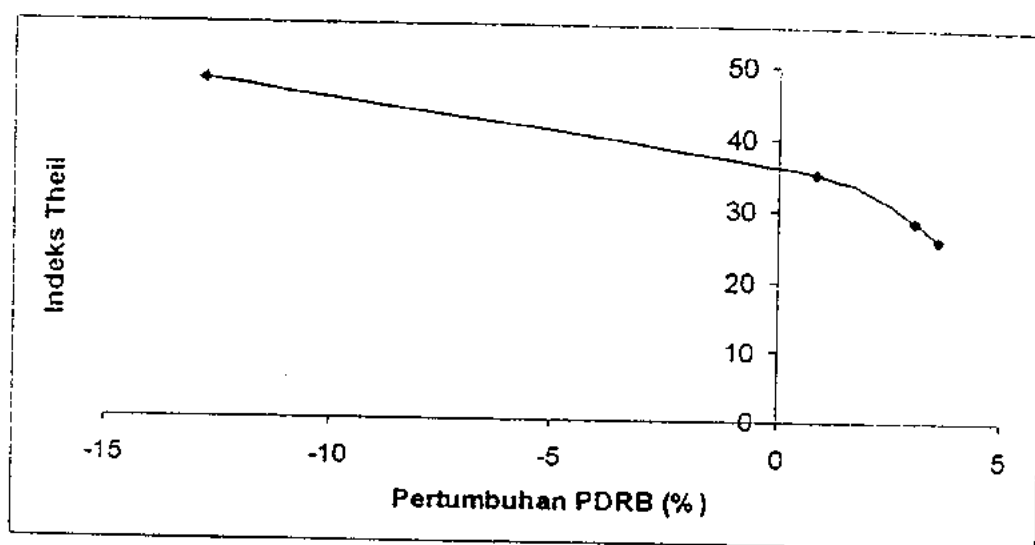
Hubungan antara indeks ketimpangan Williamson dan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) dapat dilihat pada gambar 6.4.



Gambar 6.4 Kurva hubungan antara indeks ketimpangan Williamson dengan pertumbuhan PDRB Kabupaten Jombang Jawa Timur, 1998-2002.

Dari gambar 6.4 tidak menunjukkan bentuk “U” terbalik. Hal ini berarti bahwa, pada masa-masa awal pertumbuhan ketimpangan membaik atau ketimpangan berkurang, pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan akan naik.

Sedangkan untuk hubungan antara indeks ketimpangan Theil dengan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 6.5 Kurva hubungan antara indeks ketimpangan Theil dengan pertumbuhan PDRB Kabupaten Jombang, 1998-2002.

Dari gambar 6.5 juga tidak menunjukkan bentuk “U” terbalik. Hal tersebut sejalan dengan gambar pada indeks ketimpangan Williamson.

Gambar 6.4 dan 6.5 memperlihatkan hubungan antara pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) dengan indeks ketimpangan yang terdapat pada gambar 6.4 dan 6.5 tersebut tidak menunjukkan bentuk “U” terbalik. Kurva yang tidak berbentuk “U” terbalik tersebut menunjukkan bahwa hipotesis Kuznets dapat dikatakan tidak berlaku di Kabupaten Jombang Jawa Timur.